

## DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Abstrak .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis .....	7
2. Kegunaan Praktis .....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	15
F.1 Metode Pendekatan.....	15
F.2 Spesifikasi Penelitian .....	15
F.3 Tahap Penelitian.....	15
F.4 Teknik Pengumpulan Data.....	16
F.5 Metode Analisis Data.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PATEN, LISENSI PATEN,  
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DAN *COMPULSORY  
LICENSE* MENURUT UNDANG-UNDANG PATEN DAN DEKLARASI  
DOHA SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

A. Paten Pada Umumnya.....	18
1. Pengertian Paten.....	18
2. Subjek Paten.....	20
3. Objek Paten.....	20
B. Paten Bidang Farmasi.....	27
C. Pengalihan dan Lisensi Paten.....	29
D. Lisensi Sukarela.....	30
1. Pengertian Lisensi.....	30
2. Macam-macam Lisensi.....	31
3. Perjanjian Lisensi Paten.....	32
E. Lisensi Wajib.....	35
F. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.....	38
G. Perlindungan Paten Bidang Farmasi dalam <i>Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)</i> .....	41
H. Deklarasi DOHA.....	45

BAB III PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP  
OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL DI INDONESIA

A. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (PPoP).....	49
1. Obat Antiviral dan Antiretroviral dalam Pelayanan Kesehatan Warga Negara.....	49
2. PPoP Menurut Perjanjian TRIPs ( <i>TRIPs Agreement</i> ).....	52
3. PPoP Menurut Deklarasi DOHA ( <i>DOHA Declaration</i> ).....	53
4. PPoP Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.....	55
B. Syarat-syarat Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (PPoP).....	57
1. Syarat-syarat PPoP Menurut Perjanjian TRIPs ( <i>TRIPs Agreement</i> ).....	57
2. Syarat-syarat PPoP Menurut Deklarasi DOHA ( <i>DOHA Declaration</i> ).....	58
3. Syarat-syarat PPoP Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.....	59
C. Tata Cara PPoP Obat Antiviral dan Retroviral dan Kewajiban Para Pihak.....	59
1. Tata Cara PPoP dan Kewajiban Para Pihak Menurut Perjanjian TRIPs ( <i>TRIPs Agreement</i> ).....	59
2. Tata Cara PPoP dan Kewajiban Para Pihak Menurut Deklarasi DOHA ( <i>DOHA Declaration</i> ).....	64
3. Tata Cara PPoP dan Kewajiban Para Pihak Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.....	65

D. Peraturan-Peraturan Terkait Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral.....	67
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.....	67
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah .....	68
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral .....	71
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 109/MENKES/SK/III/2013 tentang Penunjukan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Untuk dan Atas Nama Pemerintah Melaksanakan Paten Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral.....	73
 BAB IV ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL DALAM UNDANG-UNDANG PATEN BERDASARKAN DEKLARASI DOHA	
A. Lisensi Wajib dan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Paten Obat Antiviral dan Antiretroviral .....	75
B. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah di Indonesia Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral.....	80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	89
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
DAFTAR TABEL.....	xx

